

**PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM MEMBINA
PENGHULU DAN PERANGKAT KEPENGHULUAN BATU HAMPAR
KECAMATAN TANAH PUTIH TANJUNG MELAWAN
KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2012**

Oleh :

Anggi Saputra dan Muhammad Ridwan

e-mail : anggisaputra4491@yahoo.com

Hp : 085272888332

ABSTRACT

The Penghulu and Kepenghuluan Devices are key in various development, and social services that exist in Kepenghuluan. The better Penghulu and Kepenghuluan device in carrying out its duties, the better the various development and social services Kepenghuluan. Therefore, as an extension of the sub-district the District Administration should conduct training, supervise the implementation of the tasks and devices Penghulu Kepenghuluan, so what is the purpose of the organization can be achieved with either.

This study aims to determine why the performance of duties in fostering Penghulu Head and The Kepenghuluan Batu Hampar in 2012 did not go well and look at the obstacles faced in fostering Penghulu Head and The Kepenghuluan Batu Hampar Year 2012.

The conclusion of this study is to provide guidance to the Head has a variety of ways. Head coaching process is carried out by providing guidance, give direction, provide training and education, providing instruction and provide clues to the books and Devices Penghulu Kepenghuluan. But in practice based on the results of the study were less goes well. Less than optimal in fostering Penghulu Head and The Kepenghuluan Batu Hampar because of limited ability and understanding Penghulu and Devices Kepenghuluan meteri flagstones in implementing guidance provided by the Head. Development funds and facilities and inadequate infrastructure that makes inhibiting Head in fostering, plus the lack of discipline in terms of accuracy Kepenghuluan Apparatus and compliance officers against any given time on any business day.

Keywords : District, Development, Government Kepenghuluan

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, secara tidak langsung telah merubah sistem pemerintahan Indonesia dari paradigma sentralisasi kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawa (**H.A.W. Wijadja, 2005 : 28**). Konsekuensi perubahan tersebut salah satunya adalah pelaksanaan pemerintahan yang baik ditingkat pusat maupun daerah. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan otonomi merupakan jawaban yang sangat tepat dalam mendorong proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara demokratis. Pengembangan dan pembangunan otonomi daerah tetap dalam kerangka Kesatuan Republik Indonesia dan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintahan daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pembangunan disegala bidang didaerah khususnya maupun nasional umumnya.

Berkaitan dengan pemerintahan desa yang keberadaannya berhadapan langsung dengan masyarakat, maka sejalan dengan otonomi daerah sangat penting diadakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa guna terwujudnya tujuan otonomi desa. Dengan adanya pembinaan diharapkan Pemerintahan Desa mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan. Secara umum keberhasilan dari pelaksanaan otonomi desa sangat tergantung pada kemampuan aparatur pemerintahan supra desa yang berada diatasnya, dalam hal ini adalah kecamatan, kabupaten, propinsi dan pusat.

Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan memiliki sebutan lain dari desa yaitu Kepenghuluan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa daerah diberi kebebasan untuk memberi aturan atau sebutan bagi semua masyarakat desa berdasarkan hak asal usul dari kehidupan bersama masyarakat tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 telah menetapkan sebutan desa menjadi Kepenghuluan dan kepala desa menjadi kepala kepenghuluan atau penghulu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 menyebutkan kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Selanjutnya dinyatakan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Camat selain memiliki tugas memperoleh pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati/ Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

- e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Camat diberikan peranan yang tegas dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Menurut ketentuan dalam Pasal 126 Ayat (3) huruf f Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pasal 21 maka dapat dijelaskan juga secara lebih rinci bahwa tugas Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, meliputi :

- a) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintah desa dan/atau kelurahan.
- b) Memberi bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.
- c) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah.
- d) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan.
- e) Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan ditingkat kecamatan kepada bupati/walikota.

Dikarenakan banyaknya tugas pembinaan dan pengawasan yang diselenggarakan oleh Camat, maka untuk menghemat waktu, pikiran dan biaya, penulis lebih memfokuskan pembinaan camat yang terdapat pada pasal 21 huruf (c) dan (d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yakni membina kepala desa dan perangkat desa, atau dengan sebutan lain membina penghulu dan perangkat kepenghuluan. Dalam hal ini Camat merupakan figur yang memiliki peran penting dalam membina pemerintahan kepenghuluan.

Pembinaan menurut **Mifta Thoha (2003 : 182)** adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Ada dua unsur dari pengertian ini, yakni *Pertama*, pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan tujuan, dan yang *Kedua*, pembinaan kepada perbaikan atas sesuatu.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Rokan Hilir mempunyai luas wilayah 198.32 Km², dengan jumlah penduduknya 13.048 jiwa, yang terletak lebih kurang 250 Km dari pusat Ibu Kota Provinsi dan lebih kurang 50 Km dari pusat Ibu Kota Kabupaten. Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan terdiri dari lima Kepenghuluan yaitu Kepenghuluan Melayu Besar, Kepenghuluan Melayu tengah, Kepenghuluan Batu Hampar, Kepenghuluan Mesah dan Kepenghuluan Labuhan Papan.

Kepenghuluan Batu Hampar merupakan salah satu Kepenghuluan yang terletak dekat dengan Ibu Kota Kecamatan, dan berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dari semua Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kepenghuluan Batu Hampar masih terbelakang serta kurang mendapatkan pembinaan dan perhatian dari Kecamatan dibandingkan dengan kepenghuluan lainnya, terutama dalam hal penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan. Kurangnya pembinaan dan perhatian yang diberikan ini menyebabkan Aparatur Kepenghuluan tidak mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Hal ini dapat dilihat dari segi administrasi di Kepenghuluan ini masih belum tertata baik, dalam hal manajemen pun dapat dikatakan belum maksimal karena belum mampu mengatur pemerintahan Kepenghuluan dengan baik, kurangnya rasa tanggung jawab Aparat Kepenghuluan terhadap tugas yang diembannya sehingga masih rendahnya daya kreatifitas dan inovasi Pemerintah Kepenghuluan dalam mengelola dan mengurus Kepenghuluannya serta minimnya fasilitas yang mendukung jalannya pemerintahan.

Untuk mengetahui lebih jauh fenomena tentang tugas Camat dalam membina Panghulu Dan Perangkat Kepenghuluan Batu Hampar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat berikut ini :

1. Aparatur Kepenghuluan yang kurang memahami tugas dan fungsinya, sehingga tidak terlaksana dengan baik. Misalnya pemerataan perekonomian masyarakat, memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan Pemerintahan Kepenghuluan belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan kurang berkualitasnya sumber daya manusia Aparatur Kepenghuluan, dimana tingkat pendidikan yang dimiliki Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan rata-rata tamatan SMP-SMA. Rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki aparatur kepenghuluan secara otomatis mempengaruhi terhadap pelaksanaan tugas yang diembannya.
2. Kurangnya mekanisme kerja yang jelas dilakukan Aparatur Kepenghuluan dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga tidak efektif dan efisien serta kurangnya tanggung jawab Perangkat Kepenghuluan dalam melaksanakan tugasnya. Ini terlihat dari perangkat kepenghuluan yang sering mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan masyarakat, dengan melakukan pekerjaan tambahan disamping pekerjaannya sebagai perangkat kepenghuluan. Sehingga mengakibatkan waktu dan perhatiannya tersita untuk pekerjaan tambahan.
3. Kepenghuluan Batu Hampar kurang maksimal dalam memfungsikan sarana dan prasarannya, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat seperti mengurus surat-menyurat tidak jarang dilakukan oleh masyarakat dengan mendatangi rumah aparat yang bersangkutan, yang seharusnya ini dilakukan pada tempatnya yaitu di Kantor Kepenghuluan.

Kekurangan yang ada dari Kepenghuluan tersebut dapat ditanggulangi apabila Camat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin dan sesuai dengan aturan yang berlaku yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Aparatur Kepenghuluan dalam menjalankan tugasnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang ditemukan dilapangan yang dikemukakan pada latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan menjadi arahan dan pedoman dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Mengapa pelaksanaan tugas Camat dalam membina Penghulu dan Perangkat Kependhuluan Batu Hampar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012 kurang berjalan dengan baik?
2. Faktor-faktor apasaja yang menghambat pelaksanaan tugas Camat dalam membina Penghulu dan Perangkat Kependhuluan Batu Hampar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui mengapa pelaksanaan tugas Camat dalam membina Penghulu dan Perangkat Kependhuluan Batu Hampar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012 kurang berjalan dengan baik.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apasaja yang menghambat pelaksanaan tugas Camat dalam membina Penghulu dan Perangkat Kependhuluan Batu Hampar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012.

D. Kerangka Teori

Faisal Salam (2003 : 45) menyatakan bahwa Pembinaan adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yng mempunyai sifat taat setia, patuh dan bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawab sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan juga sebagai aparatur negara.

Menurut Mifta Thoha (2003:182) Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Ada dua unsur dalam pengertian ini yaitu pembinaan berupa tindakan, proses atau pernyataan tujuan dan pembinaan berupa perbaikan atas sesuatu.

Menurut Widjaja (1988) Pembinaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan, dan mengembangkannya. Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal.

The Liang Gie (1991: 17) Pembinaan yang baik diperlukan adanya usaha koordinasi yang ditetapkan dan dilaksanakan sebagai satu kesatuan tindakan perencanaan, bimbingan, dan pengendalian atau pengawasan.

Selanjutnya menurut Nawawi (1995 : 60) Pembinaan dilakukan dengan memberikan contoh-contoh yang baik kepada bawahannya tentang bagaimana

berbuat dan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan pekerjaannya, sehingga tugas tersebut dikerjakan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Situmorang (1994 : 176) Pembinaan Pegawai dilakukan untuk meningkatkan kemampuan, semangat dan gairah kerja, disiplin dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab dan tidak mempunyai sikap dan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugas, oleh karena itu pelaksanaannya harus terus berkesinambungan.

Drs.Tjahya Supriatna (1996 : 98) menjelaskan tentang sarana pembinaan yang bisa digunakan, yakni :

1. Berbagai produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri dan keputusan menteri. Dengan berpedoman pada berbagai peraturan perundangan yang berlaku itu dijadikan dasar dan arah kemana pembinaan dilakukan.
2. Melakukan berbagai forum rapat, konsultasi, kunjungan kerja, dan pengawasan.
3. Melalui pelaksanaan program baik berupa program bantuan, proyek maupun bantuan teknis.
4. Melalui forum pendidikan, kursus, dan latihan atau tukar pelaksanaan.
5. Melalui kegiatan pemantauan, pelaporan dan evaluasi.
6. Melalui alih tugas atau mutasi personil dan dengan membentuk tim pembinaan dan lain-lain.

Sedangkan pendapat ahli lain **Santoso S (1988 : 219)** mengatakan bahwa Pembinaan untuk tercapainya hasil kerja yang baik diperlukan beberapa ketentuan, yaitu :

1. Adanya bimbingan dari atasan
2. Pemberian motivasi dari atasan kepada bawahan
3. Adanya kesempatan untuk mengembangkan karier, dalam hal ini adalah pemberian pendidikan dan pelatihan kerja
4. Memberikan penghargaan

Fungsi pembinaan adalah membuat agar karyawan/pegawai melakukan tugas sesuai dengan apa yang diinginkan untuk mencapai tujuan organisasi dan meningkatkan semangat kerja.

Menurut Santoso (1995 : 52) Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Agar pembinaan dapat berjalan baik maka dilakukan beberapa cara :

1. Pemberian bimbingan
2. Memberikan pengarahan
3. Memberikan pendidikan dan pelatihan
4. Memberikan instruksi-instruksi
5. Memberikan buku petunjuk

Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan meliputi pada tertib administrasi. Pemberian bimbingan supervisi dan konsultasi meliputi pada penyelenggaraan bimbingan teknis. Pendidikan dan pelatihan meliputi pada pembinaan kepala desa dan perangkat desa. Pemantauan dan evaluasi meliputi pada evaluasi penyelenggaraan pemerinthan desa.

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa juga berpedoman pada

petunjuk pelaksanaan maka pemberdayaan yang dilakukan terhadap Aparatur Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Supra Desa yakni Pemerintah Daerah dan Camat sebagai koordinator melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa batu hampar sebagai berikut :

1. Bimbingan dan penyuluhan terhadap aparatur.
2. Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap.
3. Pendidikan dan pelatihan terhadap aparatur.
4. Mendistribusikan buku-buku tentang pemerintahan desa.
5. Melakukan pengawasan secara periodik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Moeleong (2002 : 3) mengatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ndraha (1997 : 23) bahwa metode kualitatif adalah suatu sasaran dapat diamati sebagaimana ia terlihat, terdengar, tercium, terbaca atau memperlihatkan dirinya, penampakan tersebut sewajar mungkin, jika itu informasi maka informasi itu direkam (dicatat) sebagaimana ia keluar dari sumbernya.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Camat Tanah Putih Tanjung Melawan dan Kantor Penghulun Batu Hampar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau pihak yang berangkutan terhadap masalah penelitian, berupa informasi tentang pelaksanaan tugas Camat dalam membina Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan Batu Hampar Tahun 2012.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui sumber lain secara tidak langsung, malainkan dari dokumen-dokumen, buku-buku atau hasil penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi infoman dalam penelitian ini adalah Camat, Sekcam, Seksi Pemerintahan Kantor Camat Tanah Putih Tanjung Melawan, Penghulu Melayu Besar, Penghulu dan Sekretaris Kepenghuluan Batu Hampar serta beberapa Tokoh Masyarakat.

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*, (Nawawi, 1987 : 79) yaitu dengan memilih orang yang berkompeten dan dianggap mengetahui secara mendalam objek yang akan diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dari instansi terkait yang berhubungan dengan penelitian ini guna melengkapi data yang diperlukan oleh peneliti.

c. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara percakapan atau komunikasi dengan melakukan tanya jawab kepada responden untuk mendapat keterangan tentang masalah penelitian.

6. Analisa Data

Untuk menyajikan data agar lebih bermakna dan mudah dipahami, maka dalam penelitian ini teknik analisa data yang dipergunakan adalah Deskriptif Kualitatif yaitu suatu analisa yang mendiskripsikan data penelitian sesuai dengan variabel yang akan diteliti. Disamping melakukan analisis hasil penelitian akan diterjemahkan dan diuraikan secara kualitatif sehingga diperoleh hasil yang berupa gambaran mengenai situasi atau peristiwa yang terjadi dilapangan.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembinaan Camat Terhadap Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan Batu Hampar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012

Pembinaan oleh Camat Tanah Putih Tanjung Melawan terhadap Pemerintahan Kepenghuluan Batu Hampar merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Dalam hal ini bagaimana peran Camat Tanah Putih Tanjung Melawan dalam melakukan pembinaan terhadap Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan Batu Hampar dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kepenghuluannya.

Menurut Santoso. S (1995) bahwa pembinaan dapat berupa memberikan bimbingan, memberikan pengarahan, memberikan pendidikan dan pelatihan, memberikan instruksi-instruksi dan memberikan buku petunjuk/pedoman.

1. Memberikan Bimbingan Terhadap Aparatur Kepenghuluan

Bimbingan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha-usaha yang dilakukan Camat untuk mengajak, menggiring, menuntun, memotivasi serta mendorong agar Pemerintah Kepenghuluan dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Bimbingan ini diberikan guna menumbuhkan kesadaran dan rasa percaya diri aparat dalam menjalankan tugas pemerintahan. Memberikan dukungan dan arahan kepada aparat supaya dapat dijadikan sebagai motivasi dalam melaksanakan tugas sehingga mereka lebih terpacu untuk mampu berkreasi dan berinovasi. Pembinaan terkait masalah bimbingan ini sudah dilakukan Camat Tanah Putih Tanjung Melawan dengan berbagai cara. Pembinaan dengan memberikan bimbingan ini berupa bimbingan teknis, penambahan ilmu dan penyuluhan mengenai pelaksanaan tugas Pemerintahan Kepenghuluan.

Pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Camat merupakan kegiatan bulanan yang seharusnya rutin dilakukan. Bimbingan yang dilakukan Camat selain bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi dan konsultasi juga berupa penambahan ilmu dengan memberikan materi-materi bimbingan seperti blangko, contoh surat, contoh laporan dan hal yang terkait lainnya. Sedangkan penyuluhan akan memperjelas segala materi-materi yang diberikan Camat kepada Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan.

Dari hasil penelitian, maka penulis menyimpulkan kegiatan pemberian bimbingan terhadap Aparatur Kepenghuluan Batu Hampar yang dilakukan Camat kurang berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena ketidakhadiran Camat pada jadwal yang telah ditentukan dan juga waktu dan penyuluhan materi yang singkat. Dari waktu yang singkat dan bahkan ketidakhadiran Camat tersebut menyebabkan Penghulu maupun Perangkat Kepenghuluan tidak dapat mencermati secara jelas bimbingan dan penyuluhan yang diberikan oleh Camat.

2. Memberikan Pengarahan Terhadap Aparatur Kepenghuluan

Pengarahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Camat untuk memberikan arahan, petunjuk atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kepenghuluan supaya dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pembinaan terkait masalah pemberian pengarahan ini sudah dilakukan Camat Tanah Putih Tanjung Melawan dengan baik. Pembinaan dengan memberikan pengarahan ini berupa memberikan arahan, petunjuk, tata cara dan langkah-langkah dalam menjalankan tugas Pemerintahan Kepenghuluan. Arahan dan petunjuk sangat berfungsi untuk membantu Pemerintah Kepenghuluan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar di tengah masyarakat. Dengan kurangnya arahan dan petunjuk akan membuat Pemerintah Kepenghuluan melakukan tugasnya tanpa prosedur yang berlaku. Sebagai mitra Camat, seharusnya Pemerintahan Kepenghuluan mendapatkan pengarahan bagaimana mereka harus menjalankan tugas dan fungsinya ditengah masyarakat, jika Pemerintah Kepenghuluan telah mendapatkan pengarahan yang jelas dari Camat tentu fungsi Pemerintahan Kepenghuluan ditengah masyarakat akan menjadi jelas.

Berdasarkan pantauan penulis dilapangan dapat disimpulkan bahwa pengarahan yang dilakukuan Camat terhadap Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan kurang berjalan dengan baik. Hal ini terlihat masih banyaknya Aparatur Kepenghuluan yang masih kebingungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mereka menjalankan tugasnya hanya melihat pengalaman Aparatur Kepenghuluan sebelumnya serta melakukan tugasnya tanpa prosedur yang jelas.

3. Memberikan Pendidikan dan Pelatihan Kepada Aparatur Kepenghuluan

Memberikan pendidikan dan pelatihan dalam penelitian ini yaitu kegiatan yang dilakukan Camat dalam membekali Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan melalui pendidikan dan pelatihan agar mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh aparat Kepenghuluan Batu Hampar diharapkan nantinya mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik yang dibebankan kepadanya tanpa arahan langsung dari pihak atasannya. Pendidikan dan pelatihan dapat dipandang sebagai salah satu jalur untuk meningkatkan kemampuan aparat kepenghuluan dalam melayani kepentingan masyarakat. Pentingnya program pendidikan dan pelatihan adalah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola kegiatan-kegiatan sesuai dengan profesinya.

Pendidikan dan pelatihan adalah merupakan upaya untuk memberdayakan Aparat, terutama untuk meningkatkan kemampuan intelektual dengan kepribadian manusia. Dengan demikian diperlukan upaya-upaya yang sistematis dalam meningkatkan kapasitas aparat agar mampu bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kebijakan untuk meningkatkan sumber daya manusia Aparatur Kepenghuluan yaitu dengan pola pelatihan dan pendidikan.

Kurangnya pengetahuan dan rendahnya tingkat pendidikan para Aparat Pemerintah Kepenghuluan membuat terhambatnya kemajuan ditingkat Kepenghuluan. Padahal Kepenghuluan merupakan ujung tombak untuk majunya suatu bangsa. Untuk itu kepada Aparat Kepenghuluan harus dilakukan pengembangan untuk meningkatkan kapabilitas Aparat Kepenghuluan dengan memberikan berbagai pelatihan, pembinaan dan pendidikan yang dapat mentransformasikan pengetahuan kepada Aparat Kepenghuluan. Maka diperlukan pembinaan terhadap Aparatur Kepenghuluan seperti perbaikan manajemen yang akan bermuara pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Camat jarang sekali atau dapat dikatakan tidak pernah memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan Batu Hampar. Hal ini sebabkan ketidakpastian Camat dalam membuat program pendidikan dan pelatihan, selain itu keterbatasan dana juga menjadi kendala bagi Camat dalam memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap Aparatur Kepenghuluan.

4. Memberikan Instruksi Terhadap Aparatur Kepenghuluan

Pemberian instruksi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha-usaha Camat untuk memberikan sejumlah perintah untuk dilaksanakan oleh Pemerintahan Kepenghuluan agar tugas dan fungsinya dapat dikerjakan.

Pembinaan terkait masalah pemberian instruksi ini sudah dilakukan Camat Tanah Putih Tanjung Melawan dengan baik. Pembinaan dengan memberikan instruksi ini berupa perintah secara langsung, tertulis, maupun lisan. Instruksi dan perintah dari Camat sangat berfungsi untuk membantu Pemerintah Kepenghuluan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hubungan yang harmonis tidak akan terjalin diantara Camat dan Pemerintahan Kepenghuluan seandainya Camat tidak

pernah memberikan instruksi kepada Pemerintahan Kepenghuluan. Dengan pemberian instruksi-instruksi yang berupa perintah Terhadap Pemerintahan Kepenghuluan akan memacu Aparatur Kepenghuluan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik itu secara lisan maupun tulisan atau dengan teknologi yang sudah maju seperti sekarang ini, Camat dapat memanfaatkan telephone atau handphone untuk memberikan instruksi secara langsung.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa instruksi-instruksi yang diberikan Camat terhadap Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan Batu Hampar cukup berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari instruksi yang diberikan Camat terhadap Pemerintah Kepenghuluan mengenai Keamanan Kepenghuluan dengan membangun pos kamling atau pos ronda disetiap Kepenghuluan dan Membuat Laporan Kegiatan Kepenghuluan, meskipun tidak semua instruksi-instruksi dapat dilakukan Pemerintahan Kepenghuluan dengan baik karena keterbatasan kemampuan, sarana dan prasarana serta keuangan atau pendanaan yang mendukung.

5. Memberikan Buku Petunjuk Terhadap Aparatur Kepenghuluan

Memberikan buku petunjuk dalam penelitian ini yaitu usaha yang dilakukan Camat dalam menyiapkan literatur atau buku pedoman atau panduan kerja bagi masing-masing Aparatur Kepenghuluan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dibebankan kepadanya.

Pembinaan dalam bentuk memberikan buku-buku patunjuk/pedoman tentang pelaksanaan Pemerintahan Kepenghuluan, Camat telah memenuhinya dengan memberikan blangko, contoh surat dan buku-buku mengenai pelaksanaan Pemerintahan Kepenghuluan. Buku-buku, blangko dan contoh surat ini diberikan kesetiap Pemerintah Kepenghuluan untuk dijadikan pedoman dalam memberikan pelayanan khususnya dalam membuat surat nantinya. Pemberian buku-buku pedoman ini bertujuan agar Aparatur Kepenghuluan dapat mempelajari dan diterapkan dalam roda pemerintahan. Buku-buku tersebut dibagikan kepada Aparat Kepenghuluan untuk dipelajari lebih lanjut dan sebagai referensi apabila dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kepenghuluan terdapat permasalahan dan kesalahan, maka Aparat Kepenghuluan dapat mengkoreksi dan mencari solusi.

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan penulis menemukan, pemberian buku-buku petunjuk/ pedoman yang dilakukan Camat terhadap Aparatur Kepenghuluan Batu Hampar kurang berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan buku-buku yang ada di Kepenghulu Batu Hampar dimana buku-buku yang ada mereka dapatkan dengan cara membeli sendiri di toko buku. Kepenghuluan Batu Hampar hanya di berikan buku pedoman yang berupa blangko contoh surat saja, itu pun tidak semua contoh surat diberikan oleh Camat, oleh karenanya Aparatur menjalankan pemerintahan semampunya saja.

Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Membina Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan Batu Hampar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2012

Dalam melaksanakan tugas pembinaan terhadap Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan, Camat juga menemukan kendala yang dapat membuat Camat

belum optimal menjalankan tugasnya, kendala yang dihadapi dalam melakukan pembinaan terhadap Penghulu dan Perangkat kepenghuluan sebagai berikut :

1. Tingkat Pendidikan Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini berpengaruh terhadap bagaimana tingkat pemahaman Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan. Di Kepenghuluan Batu Hampar tidak semua Aparatur Kepenghuluan memiliki tingkat pendidikan yang memadai.

Rata-rata tingkat pendidikan Aparatur Kepenghuluan Batu Hampar adalah lulusan SMA. Dengan umur rata-rata diatas 30 tahun. Dengan demikian, hal ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi Camat dalam melakukan pembinaan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Tingkat pendidikan yang lebih baik diharapkan dapat memberi pola fikir yang lebih efektif bagi kepenghuluannya. Selain itu pemahaman yang baik dari Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan dalam mencerna dan memahami suatu program pembinaan dari Kecamatan sangat diharapkan demi kelancaran dalam menjalankan roda pemerintahan. Terlebih lagi para Penghulu yang sudah lama tidak mengenyam bangku pendidikan.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan memang tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang mendukung, dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap atau peralatan yang cukup baik maka dapat memperlancar kegiatan atau pekerjaan pemerintahan kepenghuluan.

Sarana dan prasarana sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan, seperti komputer. Komputer diperlukan untuk pelayanan cepat di Kepenghuluan, baik itu untuk input data, pembuatan surat keterangan, pembuatan laporan dan lain sebagainya.

Dari hasil pengamatan penulis, perlengkapan sarana dan prasarana yang ada di Kepenghuluan Batu Hampar sangat terbatas untuk mendukung jalannya Pemerintahan. Namun dalam organisasi pemerintahan yang kompleks seperti sekarang ini alat-alat yang serba praktis dan efisien sangat dibutuhkan sekali. Dilain pihak peralatan yang baik tersebut tergantung pula pada kondisi keuangan yang dimiliki serta kecakapan manusia atau aparat yang menggunakannya. Maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang ada dikantor Kepenghuluan Batu Hampar belum dapat digunakan seutuhnya. Seperti Kantor Kepenghuluan yang masih saja kosong pada hari atau jam kerja. Selain itu pengetahuan dan pengoperasian fasilitas seperti komputer kurang memadai di kepenghuluan sehingga komputerpun belum dapat digunakan dengan maksimal.

3. Kedisiplinan Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan

Kedisiplinan Aparatur Kepenghuluan sangat menentukan baik atau tidaknya pelayanan dan tingkat kinerja dari aparaturnya tersebut. Camat mengatakan ada beberapa Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan yang kurang disiplin dalam

menjalankan tugasnya. Tidak hanya itu, untuk hadir satu bulan sekalipun ke Kantor Camat juga susah. Terkadang dalam kegiatan dan pengarahan di Kecamatan ada Penghulu yang tidak hadir. Hal ini menunjukkan kurang disiplin dan tanggung jawabnya Aparat Kepenghuluan dalam menjalankan tugasnya.

Faktor disiplin yang dimaksud dalam uraian ini adalah disiplin ditinjau dari aspek ketepatan dan kepatuhan setiap aparat terhadap waktu yang telah ditentukan pada setiap hari kerja. Dari uraian sebelumnya menunjukkan bahwa umumnya aparat pemerintah kepenghuluan Batu Hampar kurang efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung Jawabnya.

Dengan kata lain, bahwa salah satu faktor yang berpengaruh negatif dan dapat menghambat kemampuan terhadap pelaksanaan tugas perangkat desa sehingga menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan tugas pemerintah desa dan perangkatnya. Hal lain yang juga menjadi penyebab adalah masih rendahnya kehadiran setiap aparat desa mewujudkan kedisiplinan, terutama disiplin dalam hal ketepatan dan kepatuhan terhadap waktu/jam kerja pada setiap hari kerja.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ketidak disiplin Aparatur Kepenghuluan Batu Hampar dikarenakan kurangnya kontrol oleh Camat terhadap Pemerintah Kepenghuluan. Kontrol diperlukan untuk mengetahui bagaimana keadaan Kepenghuluan setiap harinya, baik itu kehadiran Penghulu, Sekretaris Kepenghuluan dan Perangkat Kepenghuluan lainnya. Jika kontrol dapat dilakukan dengan baik, maka intensitas ketidakhadiran Aparatur Kepenghuluan dapat diminimalisir tentunya dengan memberikan sanksi yang tegas kepada Penghulu atau Perangkat Kepenghuluan yang sering absen.

4. Dana atau Pendanaan

Dana merupakan hal yang sensitif dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam kaitannya dengan pembinaan Camat terhadap Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan, Camat mengatakan bahwa dana merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kurang efektifnya pembinaan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dana merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan suatu kegiatan. Baik itu kegiatan di Kepenghuluan maupun di Kecamatan. Dengan ketersediaan dana yang cukup yang dimiliki akan lebih mempermudah pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Camat terhadap Aparatur Kepenghuluan. Di tingkat Kecamatan banyak sekali kegiatan yang sudah diprogramkan dengan anggaran dananya masing-masing. Untuk dana pembinaan Camat merasa dana yang diberikan kurang memadai. Banyak yang akan dilakukan dalam melakukan pembinaan, diantaranya seperti memberikan materi yang berupa buku pedoman dan terlebih lagi jika diperlukan mendatangkan nara sumber yang didatangkan untuk memberikan pengarahan atau penyuluhan yang berkaitan dengan pembinaan. Setiap program kegiatan membutuhkan dana dalam pelaksanaannya, itu sebabnya sumber dana menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Camat dalam membina Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan.

G. Penutup

1. Kesimpulan
 - a. Pelaksanaan tugas Camat dalam membina Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan Batu Hampar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, Camat sudah melakukannya dengan berbagai cara, proses pembinaan dilakukan Camat dengan memberikan bimbingan, memberikan pengarahan, memberikan pendidikan dan pelatihan, dan memberikan buku-buku petunjuk atau pedoman. Namun semua yang dilakukan Camat tersebut dirasa kurang berjalan dengan baik atau belum memuaskan oleh Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan serta Masyarakat, karena pembinaan tersebut tidak dilakukan secara rutin. Selain itu Camat juga jarang melakukan kunjungan langsung ke Kepenghuluan sehingga kurang terjalinnya hubungan yang harmonis antar Kecamatan, Kepenghuluan dan Masyarakat.
 - b. Kurang optimalnya Camat dalam membina Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan Batu Hampar disebabkan oleh beberapa faktor yang menghambat diantaranya yaitu keterbatasan kemampuan pemahaman Aparatur Kepenghuluan dalam mengimplementasikan materi pembinaan yang diberikan oleh Camat, sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam melaksanakan tugas serta kurang optimalnya Penghulu dan Perangkat kepenghuluan dalam menggunakan sarana dan prasarana yang ada, Kurang disiplinnya Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan dalam melaksanakan tugasnya sehingga menghambat Camat dalam melakukan pembinaan, serta ditambah lagi dana pembinaan yang belum memadai yang menyebabkan Camat memiliki keterbatasan dalam melaksanakan program pembinaan yang telah direncanakan.
2. Saran
 - a. Dalam melakukan pembinaan terhadap Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan Batu Hampar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, hendaknya Camat Tanah Putih Tanjung Melawan mendatangkan orang yang ahli dibidangnya untuk memberikan ilmu kepada Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan demi maksimalnya hasil yang diterima Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan sert dapat diterapkan dengan baik.
 - b. Dalam upaya mengatasi faktor-faktor penghambat bagi Camat dalam membina Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan Batu Hampar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, sebaiknya Camat Tanah Putih Tanjung Melawan melakukan koordinasi dengan Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan demi terjalinnya hubungan kerja yang baik, selain itu Camat juga melakukan koordinasi kepada Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat lebih memfasilitasi kegiatan pembinaan di Kecamatan, baik itu berupa dana, sarana dan prasarana maupun mendatangkan ahli atau narasumber.

H. Daftar Pustaka

- Foster, Bill dan Seeker. Karen R. 2010. *Pembinaan Untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai* : Jakarta
- Gie, The Liang. 1991. *Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara*. Yogyakarta : Gajah Mada Press
- Indonesia. (Peraturan-Peraturan). 2007. *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : FH UII Press
- Jarome, J Paul, 2001. *Pembinaan Karyawan Melalui umpan Balik*. Jakarta : PPM
- Nawawi, Hadari. 1995. *Pengawasan Melekat Dilingkungan Aparatur Pemerintahan*. Jakarta : Erlangga
- Ndraha, Taliziduha. 1987. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Renika Cipta
- Moleong, L.j. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Prakoso, Joko. 2003. *Pembinaan Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta : Rineka Cipta
- Salam, Dharma Setyawan. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Penerbit Djambatan, Edisi Revisi
- Salam Faisal, 2003. *Penyelesaian Sengketa PNS Di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju
- Siagian, SP. 2002. *Meningkatkan Produktifitas Kinerja*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sastroputro, Santoso. 1998. *Partisipasi Komunikasi Persuasif dan Disiplin Dalam Pembangunan*. Jakarta : PT. Alumni
- Santoso. 1995. *Pembinaan Dalam Organisasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : PT Renika Aditama
- Thoha, Miftah. 2003. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Perssada
- Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta : Rajawali Press